

ISTILAH-ISTILAH DALAM PERADILAN ISLAM

Oleh : Eka Putra

Abstrak:

Peradilan Islam sesungguhnya memiliki beberapa peristilahan dalam mengertikan hukum. Peristilahan itu bisa disebut dengan *al-qada'*, *al-adl/al-qist*, *al-hukm*, *al-iffa'*, dan *al-ijtihad*.. Dalam hal ini ternyata terdapat perbedaan istilah yang dipakai dalam membahas dan menetapkan sesuatu hukum. Karena adanya perbedaan kasus-kasus itu. Semua penetapan itu didasarkan kepada ahwal yang ada dan terjadi ketika itu.

Kata kunci : *Istilah, Hukum, Peradilan Islam*

A. Pendahuluan

Setelah membicarakan usul fiqh, yang secara teiritis merupakan sarana utama dan pedoman dalam mengistimbatkan dan men-*tatbiq*-kan hukum, maka sekarang sampailah kita pada kajian menyangkut penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kajian dimaksud secara umum terlihat pada *al-siyasat al-syar'iyah* dan khususnya berkenan dengan kajian tentang *al-qada'*.

Seperti diketahui, bahwa setiap cabang ilmu terdapat istilah-istilah teknis yang sering dipakai untuk menuturkan suatu hal atau peristiwa, maka di dalam kajian *al-qada'* terdapat pula beberapa istilah teknis yang sering muncul dan biasa dipakai dalam menamai suatu kasus, hal, atau peristiwa yang dihadapi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah tersebut maka lebih dahulu akan ditelusuri pengertian istilah-istilah dimaksud. Di antara istilah-istilah tersebut ialah: *al-qada'*, *al-adl/al-qist*, *al-hukm*, *al-iffa'*, dan *al-ijtihad*.

Seterusnya, sebagai pendahuluan kajian tentang *al-qada'* penting untuk diketahui tentang hukum mendirikan lembaga *al-qada'* tersebut dan bagaimana peranan lembaga tersebut dalam *al-siyasat al-syar'iyah* dan dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

B. Pengenalan Istilah

1. Al-Qada'

Lafal *al-qada'* (jamaknya: *aqdiyah*) secara etimologi berarti الفراغ (selesai, putus, habis, kosong), الاراء (tunai atau membayar), dan juga berarti المنع atau الحكم (mencegah atau melarang).¹⁵¹ Ibn Manzur menukilkkan dari al-Zuhri, bahwa lafal *al-qada'* mempunyai banyak arti, tetapi semuanya itu mengacu kepada terputusnya sesuatu dan

¹⁵¹ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada' fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1964), hal. 11



sempurna/selesainya sesuatu itu.¹⁵² Dari beberapa pengertian itu Su'ud Ali Duraib menyimpulkan, bahwa *al-qada'* bisa berarti sifat hukum yang harus dilaksanakan dalam batas-batas tertentu dan bisa pula berarti nama bagi suatu hukum dalam suatu peristiwa.¹⁵³

Di dalam Al-qur'an banyak pula lafal *al-qada'* (dan musytaqnya) dalam arti yang berbeda-beda, antara lain pengertiannya ialah :

1. الحكم (hukum atau putusan), seperti terdapat dalam surat an-nisaa ayat 65:

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

2. الحتم واللزوم (mewajibkan dan memastikan), seperti pada surat saba' ayat 14:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ...

3. الامر (perintah), seperti pada firman Allah SWT seperti dalam surat al-Isra' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

4. الانتهاء والاسلاغ (menyampaikan), seperti pada surat al-Isra' ayat 4:

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ...

5. البيان (penjelasan), seperti pada firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 114:

... وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ... ﴿١١٤﴾

6. الخلق والصنع والتقدير (menciptakan dan menentukan), pada surat fusilat ayat 12 :

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ... ﴿١٢﴾

7. الفراغ من شيء والانتهاؤه منه (selesai dari melakukan sesuatu) seperti termaktub dalam surat Yusuf ayat 41 :

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾

8. العمل (amal, perbuatan), seperti pada firman Allah seperti yang termaktub pada surat thahaa ayat 72:

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾

9. القتل والهلاك (pembunuhan dan pembinasaan), pada surat al-qashash ayat : 15

...فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ...

10. بلوغ الشيء ونيله (mencapai sesuatu), seperti pada surat al-Ahzab ayat

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ۗ ﴿٣٧﴾

11. المضي (berlalu), seperti pada surat Yunus ayat 71:

...ثُمَّ أَقْبَضُوكَ إِلَىٰ الْوَالِدِ وَلَا تَنْظُرُونَ ﴿٧١﴾

Pengertian-pengertian di atas menurut Su'ud Ali Duraib mengacu kepada penyempurnaan sesuatu dan menyelesaikannya, baik dari segi perkataan ataupun perbuatan.¹⁵⁴

¹⁵² Ibn Manzur, *lisan al-Arab*, XX, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hal.47

¹⁵³ Su'ud Ali Duraib, *al-Tanzim al-qada' fi al-Mamlakat al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyad: Hanafiyah Offset, 1983), hal. 35

¹⁵⁴ *Ibid*, hal, 37-39



Adapun pengertian al-qada' dalam peristilahan fikih, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara alain adalah :

1. Keputusan menyangkut hukum syara' yang sifatnya memaksa.¹⁵⁵
2. Penyelesaian suatu persengketaan dan pemutusan suatu perkara dalam bentuk tertentu.¹⁵⁶
3. Perealisasi hukum syara' dalam bentuk tertentu oleh orang yang mempunyai wewenang, menyangkut suatu kasus, demi tercapainya kemaslahatan hidup di dunia, dan realisasi hukum tersebut bersifat memaksa.¹⁵⁷

Dari batasan-batasan di atas kelihatan bahwa ruang lingkup al-qada' adalah menyangkut pelaksanaan hukum syara' dalam suatu kasus tertentu, yang bertujuan agar terwujudnya ketentraman dan kemaslahatan hidup duniawi. Secara formal hal itu dilakukan oleh seseorang yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam wilayah tertentu. Keputusan orang yang berwenang tersebut sifatnya mengikat, dengan arti kata wajib dipatuhi oleh orang yang tersangkut dengan perkara yang diputuskan itu.

2. Al-'Adl / Qist

Al-'Adl dalam pengertian kebahasaan berarti pertengahan, lurus, menyamakan antara dua hal, dan insaf.¹⁵⁸ Al-Qurtubi menyamakan antara arti *al-'adl* dan *al-qist* baik dari segi etimologi maupun dari sudut istilah. Demikian pula pendapat Muhammad Abduh di dalam tafsir al-Manar. Hanya al-Qurtubi mengatakan, bila *al-qist* diambil dari akar kata *aqsata, yuqsitu*, dengan isim fa'il *muqsit*, maka artinya sama dengan *al-'adl*, tetapi jika diambil dari kata *qasata* dengan isim fa'il, *qasit*, rtinya jair (aniaya), atau kebalikan dari adil.¹⁵⁹

Al-'Adl dalam istilah mempunyai arti yang amat luas dan bermacam-macam sesuai dengan lapangan penggunaannya. Al-Qurtubi mengutip pendapat Ibn al-'Arabi menjelaskan, bahwa adil mencakup beberapa objek, yang masing-masingnya mempunyai arti lain. Adil antara hamba dengan Tuhannya bearti mengutamakan hak Tuhan dari dirinya. Adil seseorang terhadap dirinya sendiri berarti kemampuannya dalam mengendalikan dirinya dari terjerumus kepada kebinasaan. Adil seseorang terhadap orang lain ialah kemampuannya berbuat baik terhadap orang tersebut serta tidak mengkhianatinya dan sanggup bersabar dalam menghadapi sesuatu yang ditimpakan orang itu kepada dirinya.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Ali al-Tarabulusi, *Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi*, (Mesir: t.tp, 1937), hal.7

¹⁵⁶ Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hal.12

¹⁵⁷ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.61

¹⁵⁸ Ibrahim Anis, dkk.,

¹⁵⁹ Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, XX, , (Bairut; Dar al-Fikr t.t.), hal. 17 dan lihat *al-Manar*, III, hal. 39

¹⁶⁰ *Ibid.*



Dalam tasawuf adil diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menaham gelora nafsunya, sehingga ia dapat mengendalikan kemarahan dan syahwatnya dengan akal dan tuntunan syara'.¹⁶¹ Sejalan dengan definisi di atas di dalam periwayatan nas-nas syara' ditetapkan bahwa salah satu syarat kesahihan riwayat adilnya perawi. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah keterpujian sifat rawi tersebut. Tegasnya yang dikatakan adil dalam riwayat ialah :

صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة حم فتحصل ثقة النفس بصدقه ويعتبر فيها اجتناب الكباير.¹⁶²

Karena masalah riwayat menyangkut kepribadian rawi, maka oleh para ulama hadis dan usul fikih ditekankan sifat keberagaman seseorang untuk dapat diterima riwayatnya. Penekanan ini didasarkan atas peringatan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا....

Tidak berbeda dengan definisi yang dikemukakan ulama hadis dan usul di atas, para fukaha juga menetapkan factor kebersihan pribadi seseorang dalam masalah *syahadah* (kesaksian). Mereka menetapkan bahwa orang yang dapat diterima kesaksiannya dalam suatu perkara atau perikatan dan transaksi ialah orang tersenbut harus adil. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah :

اجتناب الكباير وعدم الاصرار على الصغائر¹⁶³

Adil di sini merupakan lawan dari fasiq. Orang yang fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya, seperti firman Allah SWT pada surat an-Nur ayat 4 :

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Selain definisi di atas para fukaha juga mengartikan adil dengan :

ايصال كل حق الى مستعقه

Adil dalam arti terakhir ini kelihatannya lebih luas dan dapat diterapkan dalam berbagai lapangan dan pengertian inilah yang banyak diterapkan dalam masalah peradilan, terutama sekali menyangkut masalah hak.

3. Al-Hukm

Al-Hukm (jamaknya *al-ahkam*) secara etimologi sinonim dengan al-'ilm, al-fiqh, al-qada' bi al-'adl.¹⁶⁴ Al-Hukm juga bearti menahan; kalau dikatakan: Anda

¹⁶¹ Al-Gazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, III, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), hal. 53

¹⁶² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hal.232

¹⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI (Bairut: Dar al-Fikr , 1985), hal. 565

¹⁶⁴ Ibn Manzur, *op.cit.*, XV, hal. 30



menghukumnya dengan demikian, artinya ialah anda menahannya.¹⁶⁵ Hakim disebut dengan 'hakim' karena ia mencegah (menahan) si zalim dari berbuat aniaya.¹⁶⁶

Di dalam Al-qur'an terdapat banyak lafal al-hukm (dan *musytaq*-nya).

Di antara arti yang ditujukkannya ialah :

1. Ilmu dan hikmat, seperti pada firman Allah SWT seperti dalam surat al-Syuara' ayat 21 yang berbunyi :

فَفَرَزْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾

2. Kokoh dan rapi, seperti pada firman Allah seperti dalam surat Hud ayat 1 yang berbunyi :

الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

3. Mengacu kepada pengertian al-qada', seperti pada seperti dalam surat Shad ayat 26 yang berbunyi :

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ..... ﴿٢٦﴾

Dalam istilah ilmiah lafal al-hukm juga mempunyai banyak arti. Para ulama usul fikih mengatakan, bahwa yang dikatakan al-hukm ialah :

167 خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاتتضاء والتخييرو الوضع

Di sini kelihatan, bahwa hukum merupakan suatu *khitab* (firman) Tuhan terhadap mukallaf menyangkut perbuatannya. *Khitab* itu boleh jadi berupa tuntutan berbuat, memilih, atau membuat sesuatu menjadi berkait dengan adanya yang lain (al-wad'). Dari tuntutan berbuat dan memilih muncul lima bentuk hukum tersebut disebut hukum *taklifi*. Sedangkan dari al-wad; muncul pula tiga hukum, yaitu: *al-Sabah*, *al-syart*, dan *al-mani*'.

Dalam istilah fikih yang dikatakan al-hukm ialah :

الاتر الذي يقتضيه خطاط الشارع¹⁶⁸

Al-Hukm di sini bukanlah *khitab* itu sendiri, tetapi hasil yang timbul dari kehendak *khitab* tersebut, yang terjelma dalam tindakan mukallaf.

169 هو نفس النص يصدر من القاض قى موضوع التراع

Dari defini tersebut di atas kelihatan bahwa yang dikatakan hukum dalam peradilan ialah keputusan hakim dalam suatu perkara yang dihadapinya. Keputusan itu boleh berupa ucapan lisan dan boleh pula berupa teks tulisan. Sifat keputusan itu adalah mengikat, dengan arti kata ia tidak dapat dilanggar, kalua dilanggar akan mengakibatkann si penlanggar dikenai sanksi penlanggaran.

¹⁶⁵ Al-Fayumi, *al- Misbah al-Munir*, I, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, , t.t.), hal. 157

¹⁶⁶ Ibn Manzur, *loc.cit*.

¹⁶⁷ Muhammad Abu Zahrah, *usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 21

¹⁶⁸ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal. 65

¹⁶⁹ *Ibid*.



Hukum Islam sendiri secara umum dapat dibagi dua: Pertama, hukum yang mengikat bila diundangkan, tetapi bila tidak diundangkan ia tidak mengikat, seperti hukum minum khmar, judi, dan sebagainya. Kedua, hukum yang senantiasa mengikat dimanapun mukallaf berada, seperti asalat, puasa, haji dan sebagainya.

4. Al-Ifta'

*Al-Fatwa atau al-Futya artinya ialah jawaban terhadap sesuatu problem yang muskil dalam bidang hukum.*¹⁷⁰ Di dalam Al-Qur'an terdapat lafal *yastaftun* (kata dari *al-istifta*) dan lafal *yufti* pada dua tempat, yaitu pada surat anisa' ayat 127 dan 176 :

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ

....

Ayat yang pertama berbicara tentang hubungan suami isteri dan pemeliharaan anak yatim, sedangkan ayat kedua berbicara mengenai warisan *kalalah*. Mahmud Syaltut menyebutkan, dikhususkan Tuhan kata *istifta'* dalam dua tema pada ayat di atas bukan kata *sual* menunjukkan betapa pentingnya kesungguhan dalam menghadapi dua pokok permasalahan tersebut, yaitu masalah keluarga dan harta benda. Dan sekaligus hal demikian menunjukkan bahwa *istifta'* berbeda dengan *sual*. *Istifta'* menghendaki keseriusan nalar untuk memikirkan jawabannya, sedangkan *sual* tidak demikian.¹⁷¹ Dari itu seseorang mufti haruslah orang yang mempunyai kemampuan ilmiah dan berwibawa, seperti disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal, bahwa seyogyanya seseorang yang menyediakan didi untuk memberi fatwa memiliki lima karakter, yaitu :

1. Ia harus mempunyai niat yang tulus.
2. Ia harus berilmu, penyantun, terhormat, dan tenang.
3. Ia harus mempunyai kemampuan fisik dan mengenal permasalahan yang dihadapinya dengan baik.
4. Tidak cacad dan harus cerdas
5. Mengenal tipe manusia yang dihadapinya.¹⁷²

Dari syarat-syarat yang ditentukan oleh Ahmad ibn Hanbal di atas kelihatan bahwa seseorang mufti adalah seorang ulama yang dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan penuh ketulusan dan mempunyai ilmu yang luas, di samping juga mempunyai wibawa di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat, masalah-masalah hukum senantiasa muncul. Hal ini disebabkan adanya perubahan-perubahan dalam berbagai lapangan kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut memerlukan suatu ketentuan hukum. Salah satu jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul itu adalah berupa fatwa. Fatwa sifatnya adalah kasuistik

¹⁷⁰ Muhammad Salam Madkul, *op.cit.*, hal. 135

¹⁷¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qalam , t.t.), hal. 11

¹⁷² Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal. 319



karena merupakan respon atau jawaban terhadap daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi/hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat si peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu yang sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.¹⁷³

Berbeda dengan qada' fatwa kelihtannya lebih luas dan produknya lebih longgar. Secara rinci antara fatwa dan qada' dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Qada'* merupakan produk qadi yang bertitik tolak dari sebab-sebab dan alasan-alasan dalam suatu perselisihan. Sedangkan fatwa adalah jawaban mufti yang bersumber dari hukum Allah terhadap suatu permasalahan yang dihadapinya.
2. *Qada'* khususnya menyangkut perselisihan antar manusia dan bertujuan untuk kemaslahatan dunia. Sedangkan fatwa menyangkut segenap permasalahan hukum termasuk ibadah, dan tujuannya menyangkut kemaslahatan dunia dan akhirat.
3. *Qada'* bertitik tolak dari alasan-alasan dan suatu perselisihan yang disorot dengan dalil-dalil. Sedangkan fatwa bertitik tolak dari dalil-dalil saja.
4. Keputusan qadi mengacu kepada menghilangkan perselisihan. Sedangkan fatwa bersifat lebih umum dari itu
5. Setiap qadi adalah mufti, tetapi tidak sebaliknya. Hal ini disebabkan karena fatwa bersifat umum. Sedangkan hukum (peradilan) khusus menyangkut peristiwa tertentu.
6. Fatwa adalah *syari'ah ammah*, menyangkut semua permasalahan, tetapi *qada'* tidak demikian.¹⁷⁴

Karena fatwa lebih umum dan luas, maka dalam perjalanan sejarah kelihtan bahwa mufti dapat muncul dengan sendirinya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang yang dipandang alim dalam suatu masyarakat dengan sendirinya orang seperti ini terlihat pada ibn Taimiyah, al-Nawawi, ibn Hajar al-Haitami, dan lain-lain. Di samping itu terdapat pula mufti yang secara formal diangkat oleh penguasa karena kealimannya, hal ini terlihat pada Imam Malik, Muhammad Adbuh, dan lain-lain.

5. Al-Ijtihad

Ijtihad adalah mengerahkan suatu kemampuan secara maksimal untuk mencapai sesuatu. Dalam istilah usul fikih disebutkan bahwa *ijtihad* adalah :

بدل الفقيه وسعه في الاستنباط الأحكام العملية من ادلتها التفصيلية¹⁷⁵

Dari batasan di atas kelihatan, bahwa *ijtihad* adalah suatu proses kerja intelektual dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya, yang dilakukan dengan penuh kesungguhan.

¹⁷³ M. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1991), hal.1-2

¹⁷⁴ Diringkaskan dari Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.69

¹⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hal.301



Ulama lain mengemukakan definisi ijihad sebagai berikut:

استفراغ الجهدو بذل غاية الوسع, اما فى استنباط الاحكام الشرعية واما فى تطبيقه.¹⁷⁶

Bertitik tolak dari definisi kedua di atas, maka ijihad dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *ijihad istimbat* dan *ijihad tatbiqi*. Ijihad istimbat mengacu kepada penalaran hukum dari sumber-sumbernya sedangkan *ijihad tatbiqi* mengacu pada penerapan hukum yang telah diistimbatkan. Untuk lebih jelasnya tentang kedua bentuk ijihad tersebut, di bawah ini akan di jelaskan satu persatu.

1. Ijihad Istimbath

Jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW tentang hukum relative sedikit, di samping pada umumnya hanya memuat norma-norma dasar yang bersifat umum dan global. Dari 6000 lebih ayat Al-Qur'an, hanya sekitar 3,5 – 17,18 % saja yang memuat aturan-aturan hukum (*al-ayat al-ahkam*). Demikian pula dengan hadis juga relative tidak begitu banyak yang berbicara tentang hukum (*al-ahadis al-ahkam*). Namun, keterbatasan jumlah ayat dan hadis ahkam itu tidak berarti hukum Islam bersifat jumud (beku), tetapi justru memberikan kelenturan yang meyebabkan fikih Islam mampu menyeimbangi dinamika masyarakat dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dengan prinsip tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis para ulama bekerja keras melakukan penalaran dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak tegas ditentukan oleh nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Kesungguhan usaha semacam ini dalam usul fikih lazim disebut ijihad, dan ijihad yang lebih banyak bertumpu pada proses penalaran terhadap kandungan nas disebut ijihad *istimbat*.

Untuk tercapainya hasil yang diharapkan dalam mengistimbatkan hukum itu diperlukan persyaratan bagi mujtahid. Syarat-syarat menjadi mujtahid yang hamper disebut-sebut oleh umumnya ulama usul fikih ialah :

- a) Menguasai bahasa Arab
- b) Berpengetahuan cukup tentang Al-Qur'an
- c) Berpengetahuan cukup tentang al-sunnah

Selain ketiga syarat di atas masih ada lagi syarat-syarat lain yang disebut-sebut sebagai syarat berijihad. Namun, untuk lebih lengkap dan sistematik ada baiknya dikutip syarat-syarat ijihad yang dikemukakan oleh Sayyid Muhammad Musa dengan pengelompokkan dan rinciannya sebagai berikut :

Pertama, persyaratan umum (*al-syurut al-ammah*), yang meliputi :1) baligh, 2) berakal sehat, 3) kuat nalarnya, 4) beriman.

Kedua, persyaratan pokok (*al-Syurut al-asasiyah*), yaitu 1) mengetahui Al-Qur'an, 2) mengetahui al-sunnah, 3) memahami maksud-maksud syari'at,4) mengetahui kaidah-kaidah hukum Islam.

¹⁷⁶ *Ibid.*



Ketuga, persyaratan penting (*al-Syurut al-hammah*), yaitu 1) mengetahui bahasa Arab, 2) mengetahui usul fikih, 3) mengetahui ilmu mantiq, 4) mengetahui hukum asal (*al-baraah al-asliyah*).

Keempat, persyaratan pelengkap (*al-syurut al-takmiliyah*) yang terdiri dari : 1) tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihad, 2) mengetahui tempat-tempat khilafiyah, 3) memelihara kesalehan dan ketakwaan diri.¹⁷⁷

2. Ijtihad Tatbiq

Yang dimaksud dengan ijtihad tatbiqi ialah suatu penelitian terhadap suatu masalah di mana hukum akan diterapkan, guna mengetahui kecocokannya dengan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an atau hadis. Dengan demikian, kelihatan bahwa sasaran utama ijtihad tatbiqi ialah bagaimana supaya suatu produk hukum dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Kalau ijtihad istimbat yang menjadi objek mujtahid adalah Al-Qur'an dan hadis, maka pada ijtihad tatbiqi yang menjadi objek mujtahid adalah masyarakat dengan segala situasi dan kondisinya senantiasa berubah. Di sini mujtahid berusaha bagaimana seharusnya menerapkan ide-ide abstrak kepada permasalahan konkrit. Permasalahan tidaklah statis, tetapi selalu berkembang dan berubah. Dengan adanya perkembangan dan perubahan tersebut hal-hal yang tadinya dianggap sama dengan yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan hukum dapat diterapkan langsung kepadanya, tetapi dengan adanya perkembangan dan perubahan bisa jadi satu kali permasalahan akan bergeser dan dengan sendirinya hukumpun akan berbeda. Sebagai contoh, Abu Ishaq al-Syatibi mengemukakan penerapannya dengan menrujuk firman Allah SWT pada surat thalaq ayat 2:

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ ...

Ayat tersebut memberi petunjuk, bahwa orang yang akan dijadikan saksi harus bersifat adil. Seseorang mujtahid harus lebih dahulu mengetahui dengan teliti sifat adil yang di maksud oleh Al-Qur'an di atas. Kemudian lalu ia meneliti pada diri siapa didapati sifat adil yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut. Karena objek penelitian dan penerapan adalah manusia yang senantiasa berkembang dan berubah, maka boleh jadi seseorang yang pada suatu waktu dinilai bersifat adil di waktu yang lain dianggap tidak adil lagi, sehingga tidak layak lagi menjadi saksi. Dalam hal ini ajaran Al-Qur'an yang mengharuskan bersifat adil bagi saksi tetap stabil dan mencari yang terdapat pada diri seseorang yang akan dijadikan saksi perlu secara teliti diketahui, sehingga dengan demikian secara benar Al-Qur'an dapat diterapkan.¹⁷⁸

¹⁷⁷Sayyid Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr*, (Mesir: Dar al-Kutub al-madisah, , t.t.), hal. 160-202

¹⁷⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, IV, (Bairut: Dar al-Fikr, , t.t.), hal.47



6. Kelembagaan Al-Qur'an

a. Hukum Mendirikan Al-Qada'

Kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan asasi manusia. Orang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Seseorang tidak mampu untuk menghasilkan kebutuhannya dalam mempertahankan hidup tanpa uluran tangan orang lain. Akan tetapi uniknya di samping kehebdak di atas justeru di dalam diri manusia terdapat pula watak individualis dan suka menang sendiri. Oleh sebab itu agama-agama samawi diturunkan Tuhan sebagai peraturan yang membatasi watak-watak tersebut, sehingga manusia dapat hidup dengan tenteram dan damai. Aturan agama tersebut tidak dapat mencapai sasarannya kalau tidak direalisasikan dalam kehidupan konkret. Untuk merealisasikan aturan agama (syari'at) dalam kehidupan nyata diperlukan adanya suatu kekuasaan berupa pemerintah. Dengan demikian, mendirikan pemerintahan untuk terealisasi aturannya merupakan suatu yang wajib. Sabda Nabi SAW :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا احدهم (رواه ابوداود)
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض الا امروا عليهم احدهم (رواه احمد)

Dari dua hadis di atas kelihatan bahwa pemimpin itu perlu ada, meskipun dalam lingkungan masyarakat paling kecil. Hal demikian memberi gambaran betapa pula dengan masyarakat yang besar. Oleh itu ibn Taimiyah dalam mengomentari dua hadis di atas mengatakan, bahwa masalah mengangkat pemimpin merupakan kewajiban dalam kelompok kecil maupun masyarakat luas. Hal ini mesti, karena Tuhan telah memerintahkan melaksanakan amar makruh dan nahi munkar. Keduanya, tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan. Demikian pula halnya dengan segala perintah wajib seperti jihad, menegakkan keadilan, menjalankan ibadah haji,.... Tidak bisa dijalankan dengan adanya kekuasaan dan pimpinan.¹⁷⁹

Dalam suatu masyarakat kecil dan sederhana segala kegiatan pemerintahan, termasuk di dalamnya peradilan, dapat terlaksana di tangan satu orang, hal ini tentu berlainan dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu pada awal periode pemerintahan Islam di Madinah Nabi SAW langsung bertindak sebagai qadi. Akan tetapi ketika wilayah pemerintahan Islam bertambah luas, maka Nabi SAW mengangkat para wali untuk beberapa wilayah dan kepada sebegini mereka diserahi pula tugas sebagai qadi. Dari itu, tugas qadi merupakan penyempurnaan dari tugas imam (pemimpin), yang kalau tanpa dia tugas itu tidak akan terselesaikan. Dengan demikian pengangkatan qadi merupakan suatu kewajiban pula bagi seseorang imam yang mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, sebab disebutkan dalam kaedah fikih :

مالا يتم الواجب الا فهو واجب

¹⁷⁹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasat al-Syar'iyah*, (Mesir: Dar al-kitab al-Arabi, 1969), hal.61



Demikian pendapat jumbuh ulama, kecuali sebagian firqah Khawarij yang tidak mewajibkan adanya imam ataupun qadi.¹⁸⁰

Selain itu, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dapat dijadikan Negara wajibnya mendirikan lembaga peradilan dalam suatu Negara. Diantaranya firman Allah SWT

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥١﴾

Sabda Nabi Saw :

إذا اجتهد الحاكم فصاب فله أجران وإذا اجتهد واخطأ فله أجر (رواه البخارى ومسلم)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadis yang menyangkut penegakkan hukum itu, maka jumbuh ulama sepakat, bahwa mendirikan al-qada' hukumnya wajib, yang sifatnya fardu kifayah.¹⁸¹

b. Peranannya dalam Al-Siyasat al-Syar'iyah

Seperti disebutkan di atas, bahwa dalam suatu wilayah kekuasaan yang luas tugas kepemimpinan tidak mungkin dipegang oleh hanya seorang pemimpin. Oleh sebab itu ketika wilayah pemerintahan Islam telah bertambah luas, Rasulullah mengangkat beberapa orang wali untuk diletakkan di beberapa daerah, yang sebagiannya sekaligus bertugas sebagai qadi. Selain itu untuk selesainya segala masalah yang di hadapi di dalam masyarakat Rasulullah Saw juga membawa para sahabatnya bermusyawarah dan beliau mendengarkan pendapat-pendapat mereka untuk dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Salah satu contoh, misalnya ketika menjelang terjadinya serangan tentara Ahzab dari Makkah Rasulullah mengundang para sahabat bermusyawarah untuk menyelesaikan problem tersebut. Ketika itu diputuskan bahwa pendapat Salman al-Farisi dijadikan sebagai putusan musyawarah, di mana kaum muslimin harus menggali parit di sekeliling kota Madinah dalam rangka mengantisipasi serangan tentara Ahzab. Perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw tersebut ternyata menjadi kecambah untuk tumbuhnya pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan, yang kemudian dikenal dengan adanya tiga bentuk kekuasaan (*trias political*), yaitu: kekuasaan legislative (*al-sultah al-tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfi iyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qada'iyah*).

Ketiga bentuk kekuasaan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena antara ketiganya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kekuasaan legislative berperan dalam memutuskan suatu hukum, eksekutif melaksanakannya, dan peradilan yudikatif yang menyelesaikan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap hukum

¹⁸⁰ Su'ud Ali Duraib, *op.cit.*, hal.81

¹⁸¹ Lebih jauh lihat Ibn Taimiyah, *op.cit.*, hal.63-168



atau perundangan tersebut. Hal ini kelihatan bahwa peran lembaga peradilan sangat besar dan amat vital. Kalau tanpa lembaga peradilan suatu hukum atau perundangan akan jadi sia-sia pelaksanaannya, karena dapat membuat orang semena-mena untuk melanggarnya, sehingga hukum atau perundangan tersebut menjadi tak berarti sama sekali.

c. Peranannya dalam Menegakkan Keadilan

Selain berperan dalam mengawasi undang-undang, lembaga peradilan berperan pula dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai dasar tugas ini ialah firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 58 :

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

Realisasi dari ayat ini menurut Taimiyaqah terletak pada penegakkan *al-hudud* dan *al-huquq*. Al- Hudud dan al-Huquq dapat dibagi dua; pertama yang menyangkut kepentingan umum, yang disebut *hudud/huquq* Allah, seperti menghukum *hadd* perampok, pencuri, pezina, dan lain-lain, kedua menyangkut hak pribadi tertentu dari bani Adam, seperti penghilangan jiwa dengan pembunuhan, pelukaan, dan lain-lain yang mewajibkan adanya hukum qiyas, diyat, dan sebagainya.

Untuk merealisasikan tugas di atas lembaga *al-qada'* mempunyai peranan yang sangat besar. Bagi lembaga ini kedudukan semua orang adalah sama, tidak ada beda antara kaya dan miskin, antara rakyat jelata dan penguasa, antara yang kulit hitam dan kulit putih, bahkan seorang yang lemah akan menjadi kuat bila ia berada di pihak yang benar di depan pengadilan sebaliknya yang dipandang kuat bisa lemah bila ternyata ia berada di pihak yang salah.

Lembaga peradilan satu-satunya yang secara formal memegang wewenang khusus dalam bidang penegakkan keadilan ini, justeru itu ia harus ada dalam setiap Negara.

C. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan :

1. *Al-Qada'* adalah perealisasi hukum syara' dalam kasus tertentu oleh yang berwenang, guna terwujudnya kemaslahatan hidup duniawi.
2. Adil ialah meletakkan sesuatu pada proporsinya dengan jalan memberikan sesuatu kepada yang berhak.
3. Hukum ialah keputusan qadi terhadap suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, baik secara lisan atau tulisan.
4. Fatwa ialah jawaban terhadap sesuatu yang musykil, yang sifatnya tidak mengikat.
5. Ijtihad ialah mengerahkan segala daya secara maksimal untuk mengistimbatkan hukum syari'at dari dalil-dalilnya atau untuk menerapkannya di tengah-tengah masyarakat.



6. Lembaga *al-qada'* sangat diperlukan dalam suatu masyarakat oleh itu wajib kifayah mendirikannya. Peranannya terutama sekali ialah untuk mengawasi perundangan dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat

Daftar Pustaka

- Al-Gazali, (1939), *Ihya 'Ulum al-Din*, III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,
Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, (1989), *Usul al-Hadis*, Bairut: Dar al-Fikr
Ali al-Tarabulusi, (1937), *Mu'in al-Ahkam, Mustafa al-Babi al-Halabi*, Mesir: t.tp,
Al-Qurtubi, (t.t), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, XX, Bairut; Dar al-Fikr
Al-Syatibi, (t.t), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, IV, Bairut: Dar al-Fikr
Ibn Manzur, (t.t), *Lisan al-Arab*, XX, Bairut: Dar al-Fikr
Ibn Taimiyah, (1969), *al-Siyasat al-Syar'iyyah*, Mesir : Dar al-kitab al-Arabi
M. Atho Mudzhar, (1991), *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta:Paramadina
Mahmud Syaltut, (t.t), *al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Qalam
Muhammad Abu Zahrah, (1958), *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi
Muhammad Salam Madkur, (1964), *al-Qada' fi al-Islam*, ,Kairo: Dar al-Nahdah al-
'Arabiyah
Sayyid Muhammad Musa, (t.t), *al-Ijtihad wa Mada Hajatina ilaih fi Haza al-'Asr*, Mesir:
Dar al-Kutub al-madisah
Su'ud Ali Duraib, (1983), *al-Tanzim al-qada' fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Su'udiyah*,
Riyad: Hanafiyah Offset
Wahbah al-Zuhaili, (1985), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI Bairut: Dar al-Fikr

